

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Esensi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu Demokrasi, Pemberdayaan Masyarakat (*empowering people*), Pelayanan Prima dan Hubungan eksekutif yang didasarkan sinergisme (*check and balancing power*). Hal ini tentu sangat berpengaruh kepada proses manajemen pembangunan di daerah, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pengendalian dan pengawasannya yang kesemuanya bermuara kepada terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik (*good governance*). Perwujudan tersebut tentunya memerlukan harmonisasi tiga domain yakni unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (*civil society*) dalam suatu komitmen yang kuat atas dasar transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dari semua stakeholders dalam setiap proses manajemen pembangunan.

Penyelenggaraan kewenangan daerah yang implementasinya telah diwujudkan dalam berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan pembangunan di Kabupaten Bone,

telah cukup banyak hasil yang diperoleh dalam berbagai skala yang cukup variatif. Keberadaan berbagai aktivitas tersebut, pada hakekatnya untuk makin meningkatkan manfaat otonomi daerah bagi kesejahteraan masyarakat, sebagai komponen terpenting bagi keberadaan pemerintah daerah.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aktivitas yang multidimensional serta memerlukan kurun waktu yang harus berkesinambungan, karena di dalamnya terkait dengan akumulasi yang saling berkepentingan antara kebijakan pada tataran struktural, kondisi kultur masyarakat terhadap konsep dan prasyarat perubahan itu sendiri. Serta faktor eksternal pemerintahan dan kemasyarakatan yang tumbuh dari pengaruh dan interaksi dengan masyarakat global, yang penuh persaingan dan makin terbukanya peluang dalam berbagai aspek. Hal tersebut berarti bahwa kegiatan pemerintahan itu pada dasarnya berkesinambungan melalui tahap-tahap prioritas sesuai kebutuhan dan waktu, termasuk perubahan yang terjadi.

Salahsatu perubahan yang akan berpengaruh terhadap manajemen pemerintahan dalam mengelola pembangunan di daerah, khususnya dalam perspektif teknik akselerasi fungsi manajemen dan pemanfaatan kapasitas sumberdaya di daerah. Yaitu adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang wajib disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bone, yang secara nyata diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Tahun 2005-2025).

Pada dasarnya RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005-2025, tidak saja akan menjadi pedoman kerja Pemerintah Kabupaten Bone selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Melainkan juga menjadi kerangka acuan bagi masyarakat Kabupaten Bone untuk mengetahui arah pembangunan yang ingin diwujudkan Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya daerah selama kurun waktu yang sama.

Selain itu, sebagai bagian dari elemen pemerintah yang bertautan dalam fungsi pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone, tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah. Melainkan koneksitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada level pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan serta akselerasi pemerintahan yang diamanatkan menurut semangat reformasi dari Pemerintah Pusat.

B. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan maksud untuk menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bone sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan dapat bersinergis, koordinatif dan berkelanjutan.

D. LANDASAN HUKUM

RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Tahun 2005-2025).

E. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005-2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Kondisi Umum

Bab III Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2005-2025.

Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Bab V Penutup

BAB II

KONDISI UMUM

A. KONDISI SAAT INI

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Bone terletak dalam posisi koordinat $4^{\circ}13'-3^{\circ}06'$ LS dan antara $119^{\circ}42'-120^{\circ}30'$ BT, berbatasan dengan : sebelah Utara, Kabupaten Wajo dan Soppeng; Teluk Bone; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten dipesisir Timur Propinsi Sulawesi Selatan dengan jarak tempu 174 Km dari Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan (Makassar) yang dapat dilalui dengan menggunakan moda angkutan darat.

Luas wilayah pada Tahun 2004 adalah 4.559 Km² atau 7,30% dari wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, Kabupaten Bone terbagi dalam 27 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 372 buah.

2. Sosial Budaya

Perkembangan penduduk Kabupaten Bone selama kurun waktu 2000-2004 memperlihatkan kecenderungan semakin meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata mencapai 1,53%

pertahun, yaitu dari 648.361 jiwa pada Tahun 2000 menjadi 688.080 jiwa pada Tahun 2004, serta tingkat kepadatan penduduk 2 jiwa per hektar.

Penduduk Kabupaten Bone yang termasuk kategori penduduk usia kerja (Usia 10 Tahun ke atas) tercatat dari sebanyak 545.599 orang pada Tahun 2004, mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2003 sebanyak 541.624 orang atau bertumbuh sebesar 0,73%. Dari sebanyak 545.599 penduduk usia kerja pada Tahun 2004, sekitar 291.633 jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 53,45 %. Dari TPAK 291.633 orang, yang sempat bekerja hanya mencapai 274.758 orang dan sisanya 16.875 orang adalah pengangguran.

Pengangguran yang terjadi, tidak hanya disebabkan oleh faktor dari sisi permintaan tenaga kerja yang menurun, tetapi pada sisi penawaran tenaga kerja yang tersedia kualitasnya masih rendah. Hal ini tercermin dari kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Bone relatif rendah dibanding dengan rata-rata Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional terutama dilihat dari segi pendidikan dan kesehatan.

Menurut lapangan usaha, penduduk Kabupaten Bone masih menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian yang tercatat sekitar 185.567 orang dari 274.759 penduduk yang bekerja. Dengan demikian sektor pertanian menyerap tenaga kerja sekitar 67,54 % pada Tahun 2004.

Masih tingginya penduduk yang berusah di sektor pertanian secara langsung dapat digambarkan bahwa pengembangan ekonomi Kabupaten Bone masih berorientasi kuat pada sektor pertanian. Disamping itu, tuntutan keterampilan yang tidak begitu tinggi di sektor ini menjadikan sektor pertanian merupakan tempat berusaha bagi tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor lainnya. Hal ini dapat mendorong produktivitas pekerja di sektor pertanian lebih rendah dibandingkan dengan sektor lainnya.

Dari aspek kesehatan memperlihatkan tingkat kesehatan masyarakat masih tergolong rendah. Tercermin dari indikator kesehatan seperti Usia Harapan Hidup Tahun 2004 baru mencapai 62 tahun bagi laki-laki dan 60 bagi perempuan. Pada tahun yang sama Angka Kematian Ibu dan Angkatan kematian Bayi juga masih meningkat yaitu 10 orang per 10.274 kelahiran hidup dan 11 orang per 1.000 kelahiran hidup. Semua ini diakibatkan oleh kurang tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang lebih memadai.

Pada aspek pendidikan, pada Tahun 2004 angka melek huruf baru mencapai 79,52 %. Angka Partiiipasi Murni Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah menengah Atas masing-masing 99,64%, 76,18%, dan 39,09% dan Angka Partipasi Kasar pada jenjang pendidikan yang sama diperoleh angka masing-masing 115,24%, 77,86% dan 49,61%. Keadaan ini lebih diperparah lagi

oleh kondisi SD/MI yang berjumlah 751 buah pada umumnya mengalami kerusakan (72,44%).

Pemberdayaan perempuan dan anak, pelaksanaannya cukup memadai sejalan dengan meningkatnya aksesibilitas dan kontrol untuk mencegah terjadinya deskriminasi terhadap perempuan. Sehingga mampu berperan sejajar dengan laki-laki dalam pembangunan sesuai dengan kodrat dan martabatnya tanpa mengabaikan tugas keluarga.

Kerukunan dan peran serta ummat beragama dalam pembangunan semakin memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang cukup membaik. Terlihat pembangunan sarana dan prasarana kehidupan beragama telah mendapat perhatian yang cukup dengan bertambahnya jumlah mesjid, gereja dan tempat peribadatan lainnya secara proporsional..

Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga mengalami kemajuan melalui berbagai pembinaan mental spiritual, menanamkan minat belajar, berlatih dan semangat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan manajemen serta etos kerja yang tinggi.

Pembangunan sosial-budaya senantiasa dikembangkan dengan mengacu pada nilai-nilai budaya lokal (*indigenous knowledge*) dan kesenian sesuai dengan revitalisasi nilai budaya lokal yang dianut. Dan dikembangkan oleh masyarakat dalam bertingkah laku untuk

membentuk jati diri dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah.

3. Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Bone terlihat dari gambaran PDRB (Harga Konstan) Tahun 2003 sebesar Rp. 2.164.344,20 Juta menjadi Rp. 2.209.958,50 Juta pada Tahun 2004 atau terjadi pertumbuhan sebesar 2,11%. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik tersebut secara langsung berdampak kepada kenaikan pendapatan perkapita dari Rp. 3.156.907,- Tahun 2003, menjadi Rp. 3.211.775,- pada Tahun 2004.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone tersebut, disamping memberikan implikasi positif terhadap pembukaan lapangan kerja, juga masih menyisahkan pengangguran. Dalam Tahun 2003, jumlah angkatan kerja sebanyak 258.926 orang dan yang mampu diserap berjumlah 249.121 orang. Demikian halnya pada Tahun 2004, angkatan kerja tersedia sejumlah 291.633 orang yang terserap sekitar 274.758 orang, sehingga pada tahun yang sama masih terdapat pengangguran sekitar 16.875 orang.

Struktur perekonomian Kabupaten Bone (Tahun 2004) masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 56,97% menyusul jasa-jasa 10,39%, Perdagangan-Restoran-Hotel 8,73%, Industri Pengolahan 9,25%, dan sektor lainnya yang memiliki kontribusi antara 0,42% s/d

4,96%. Hal tersebut memberikan indikasi struktur ekonomi Kabupaten Bone yang belum berimbang antara sektor pertanian dengan sektor industri, maupun sektor-sektor lainnya.

4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemampuan daerah dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum memadai, khususnya bagi peningkatan daya saing komoditas unggulan. Hal ini ditunjukkan antara lain masih rendahnya sumbangan iptek di sektor produksi, belum efektifnya mekanisme pasar, belum berkembangnya budaya iptek di tengah masyarakat, dan terbatasnya sumberdaya iptek.

5. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana wilayah di Kabupaten Bone dilaksanakan guna menunjang pelaksanaan pembangunan bidang-bidang lainnya. Pembangunan jaringan ruas-ruas jalan, sebagian telah dilaksanakan guna menghubungkan fungsi dari masing-masing kawasan pengembangan. Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan pada sebagian ruas jalan ditujukan untuk kemudahan dan kelancaran mobilitas serta jangkauan pemasaran hasil-hasil produksi. Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Bone berupaya seoptimal mungkin menanggapi permasalahan prasarana jalan dan jembatan sesuai sumberdaya yang tersedia.

Pada tahun 2004, panjang jaringan ruas-ruas jalan Kabupaten dalam mendukung pengembangan wilayah berjumlah 2.483,200 Km. Berdasarkan jenis permukaan, jalan aspal 843,736 Km, jalan kerikil 901,394 Km, dan jalan tanah 738,070 Km. Keseluruhan permukaan jalan tersebut berkondisi baik, baru mencapai 20,20%, kondisi sedang 19,54%, kondisi rusak 25,56% dan kondisi rusak berat 34,70%.

Pembangunan pengairan di Kabupaten Bone diperuntukkan sebagai penunjang pembangunan pertanian. Pada Tahun 2004, jumlah pengairan yang ada dicakup ke dalam 144 Daerah Irigasi yang terdiri dari Irigasi Teknis berjumlah 17 buah dengan luas baku 31.357 Ha (efektif 24.891 Ha), Irigasi $\frac{1}{2}$ Teknis berjumlah 12 buah dengan luas baku 5.607 Ha (efektif 4.358 Ha) dan Irigasi Desa (sederhana) sebanyak 115 buah dengan luas baku 22.200 Ha (efektif 15.372 Ha).

Adapun jumlah saluran yang tersedia dikelompokkan menjadi saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier. Pada Tahun 2004, panjang saluran primer berjumlah 105.340 m dengan kondisi baik 80.400 m, sedang 17.700 m, dan kondisi rusak 7.240 m. Saluran sekunder berjumlah 173.660 m, berkondisi baik 103.730 m, kondisi sedang 30.410 m, dan berkondisi rusak 39.520 m. Saluran tersier berjumlah 936.345 m, dengan kondisi baik 760.225 m, kondisi sedang 66.000 m, dan berkondisi rusak sepanjang 110.120 m.

Pemenuhan air bersih bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, relatif masih rendah. Pada Tahun 2004, cakupan air bersih bagi masyarakat perdesaan baru mencapai 56,91% atau masih rendah bila dibandingkan target nasional pada tahun yang sama sebesar 60%. Demikian halnya bagi masyarakat Kota Watampone, cakupan air bersih baru mencapai 64,35% relatif masih rendah dibandingkan target nasional sebesar 80% pada tahun yang sama. Ketersediaan sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari penduduk Kabupaten Bone bersumber dari air tanah dangkal dan dalam. Air tanah dangkal/permukaan berupa air sumur, air sungai, rawa-rawa, waduk bendungan, mata air. Sedangkan pemanfaatan air dalam, menggunakan air sumur bor dalam.

6. Politik

Kemajuan demokrasi terlihat dengan telah berkembangnya hak masyarakat dalam kehidupan politik, terutama dalam pelaksanaan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden yang terlaksana secara aman pada tahun 2004 lalu. Dalam jangka panjang diharapkan akan mampu menstimulasi masyarakat untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan politik. Perkembangan ini tidak terlepas dari berkembangnya peran partai politik dan masyarakat. Di samping itu, kebebasan pers

dan media telah berkembang yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

7. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah menunjukkan kemajuan, diantaranya tindakan kriminal dan kekerasan dirasakan intensitasnya semakin berkurang. Meskipun demikian disadari juga seringnya terjadi tindakan pencurian, hal ini akan menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangannya.

8. Hukum, Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan Masyarakat

Pembangunan di bidang hukum terutama untuk mendukung terlaksananya tugas pemerintahan, telah memperlihatkan hasil yang memadai. Beberapa Peraturan Daerah (PERDA) telah ditetapkan guna memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat, sesuai kebutuhan.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat senantiasa berpegang teguh pada komitmen (kesepakatan politik para pelaku pembangunan) dan keseriusan terhadap setiap program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai prosedur dan tujuan yang ingin dicapai. Namun demikian upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan, Pemerintah Daerah masih

diperhadapkan kepada masalah supra dan infrastruktur yang kurang memadai dalam mengelola masalah-masalah pembangunan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Di samping itu, kelembagaan masyarakat dalam mengelola pembangunan, belum berjalan secara optimal. Penguatan dan pemberdayaan masyarakat masih terus diupayakan menuju kemandiriannya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk itu, pemberian, pemahaman dan kelancaran informasi serta pelibatan masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang diprakarsai oleh pemerintah daerah, menjadi sangat penting dan prioritas.

9. Wilayah dan Tata Ruang

Masyarakat di wilayah tertinggal dan terisolir khususnya yang berada di daerah perbatasan, masih memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dan ekonomi. Olehnya itu, kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tersebut memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang proporsinya lebih besar dari pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangannya antara lain : terbatasnya akses transportasi, kepadatan penduduk yang relatif rendah serta menyebar, dan kualitas SDMnya masih rendah.

Masih terdapat wilayah yang memiliki produk unggulan dan strategis, belum berkembang secara optimal, antara lain disebabkan: adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan tersebut; belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari para pelaku yang terlibat; belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah; masih lemahnya koordinasi, sinergi, kerjasama diantara pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah lainnya, dan masyarakat; masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran; keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik ekonomi.

Pembangunan perkotaan telah memperlihatkan kecenderungan yang semakin membaik. Pembangunan sarana dan prasarana kota telah dilaksanakan secara optimal seperti peningkatan jalan hot mix dalam kota yang dapat menjangkau seluruh wilayah kota Watampone. Pembangunan infrastruktur lainnya juga dilaksanakan secara bertahap dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat Kota Watampone.

Pembangunan perdesaan juga semakin diintensifkan pengembangannya. Penyediaan infrastruktur jalan desa terus diupayakan oleh pemerintah daerah dalam membuka akses bagi masyarakat. Namun demikian, kondisi sosial ekonomi masyarakat relatif masih rendah dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Hal ini merupakan konsekuensi perubahan struktur ekonomi, dimana investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah (infrastruktur dan kelembagaan) cenderung terkonsentrasi di perkotaan. Selain itu, masih terdapat kegiatan ekonomi perkotaan yang kurang sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan di perdesaan.

Rencana Tata Ruang sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan pemanfaatannya belum terlaksana optimal. Hal ini terlihat kurang dijadikannya Rencana Tata Ruang tersebut sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, disebabkan antara lain kurangnya informasi bagi masyarakat dan belum adanya mekanisme yang efektif dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

10. Perumahan dan Permukiman

Pembangunan perumahan dan permukiman belum memadai baik jumlah, kualitas maupun sarana dan prasarana. Upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, masih diperlukan ketersediaan hunian permukiman diperkotaan dan di perdesaan, sarana

pendukung, dan belum optimalnya sistem penggalangan dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan.

11. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup selama ini dilaksanakan secara tidak efisien dan berorientasi pada kepentingan jangka pendek, sehingga mengakibatkan terjadinya pengrusakan sumberdaya alam yang tak terkendali. Ekosistem laut dan terumbu karang mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaharui seketika, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemanfaatan teknologi pengelolaan dan aturan pengendaliannya.

Selain itu, terjadinya penurunan kualitas lingkungan dapat dilihat dari kerusakan beberapa ekosistem seperti mangrove (hutan bakau) di beberapa wilayah Kecamatan (pesisir) dan pemanfaatan sumberdaya lahan yang melebihi kapasitas dan daya dukungnya yang telah menyebabkan jumlah lahan kritis sekitar 78.267 Ha pada tahun 2004, diantaranya 44.362 Ha dalam kawasan dan 33.905 Ha yang berada di luar kawasan.

B. TANTANGAN

1. Sosial Budaya

Dalam 20 tahun mendatang, penduduk Kabupaten Bone diproyeksikan berjumlah 924.251 jiwa. Sejalan dengan itu, berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu melahirkan, dan meningkatnya usia harapan hidup.

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk perlu diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh secara proporsional dalam rangka menjamin keseimbangan jumlah penduduk usia produktif dengan jumlah penduduk usia non produktif.

Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai masalah dan tantangan pembangunan kesehatan yang dihadapi adalah tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, masih terdapatnya balita kurang gizi serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang belum optimal dan merata. Sementara itu, tantangan pembangunan pendidikan adalah penyediaan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunnya angka buta aksara, menurunnya kesenjangan

pendidikan antara penduduk yang mampu dan kurang mampu, penduduk antar jenis kelamin, penduduk perkotaan dan perdesaan.

Peran dan kualitas hidup perempuan serta anak di berbagai bidang, masih perlu ditingkatkan. Di samping itu, kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak masih kurang memadai. Partisipasi pemuda dalam pembangunan juga masih perlu ditingkatkan seiring dengan upaya memaksimalkan pembinaan prestasi olah raga.

Arus globalisasi dan industrialisasi akan menjadi tantangan utama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bone dua puluh tahun mendatang. Dampak pada munculnya permasalahan sosial seperti : menipisnya nilai budaya, kemiskinan, perubahan sikap dan perilaku,, kenakalan remaja, kriminalitas, kekerasan dan penyalagunaan NARKOBA, HIV/AIDS, perlu menjadi perhatian secara intensif melalui pembangunan mental dan spiritual.

2. Ekonomi

Pembangunan ekonomi Kabupaten Bone, dewasa ini telah menghasilkan berbagai kemajuan, namun masih diperhadapkan berbagai tantangan dalam mewujudkan perekonomian yang tangguh guna lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Olehnya itu, tantangan kedepan yang perlu mendapat perhatian adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdampak kepada penciptaan

lapangan kerja, distribusi pendapatan antara golongan, antar wilayah dan antar sektor secara proporsional.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tantangan utama yang dihadapi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ke depan adalah bagaimana menghasilkan lulusan pendidikan/pelatihan yang berkualitas dan mampu bersaing di sekolah unggulan dalam dan luar negeri serta di pasar kerja. Selain itu, kurangnya minat riset dan pengembangan teknologi perlu ditunjang dengan perangkat teknologi dan informasi yang lebih memadai.

4. Sarana dan Prasarana

Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor transportasi adalah peningkatan sarana dan prasarana yang selama ini telah dikembangkan ke pusat-pusat pertumbuhan dan sentra produksi, masih perlu ditingkatkan. Serta pengelolaan sumberdaya air di masa yang akan datang, perlu lebih ditingkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

5. Politik

Tantangan utama di bidang politik adalah melaksanakan reformasi struktur politik, proses dan budaya politik serta kedewasaan berdemokrasi agar berjalan bersamaan dan

berkelanjutan. Terutama dalam kaitannya dengan pelembagaan dan penerapan nilai-nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi akan diperhadapkan pada bagaimana melembagakan kebebasan pers/media massa, agar akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik sekaligus sebagai proses menemukan dan mencegah penyelewengan kekuasaan.

6. Ketertiban Umum dan Keamanan Masyarakat

Pembangunan di bidang ketertiban umum dan keamanan masyarakat menghadapi tantangan yang antara lain ketersediaan jumlah aparat penegak hukum dengan jumlah penduduk, belum berimbang secara proporsional serta belum ditunjang sarana dan prasarana pengamanan yang lebih memadai, serta euphoria reformasi yang menyebabkan sebagian masyarakat cenderung melawan hukum.

7. Hukum, Aparatur dan Kelembagaan Masyarakat

Tantangan pembangunan hukum, aparatur dan kelembagaan masyarakat yaitu kompleksitasnya permasalahan akibat desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi. Proses demokrasi yang dijalankan telah membuat masyarakat semakin sadar akan hak dan tanggungjawabnya. Partisipasi masyarakat menjadi tema sentral

dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana tingkat partisipasi masyarakat akan berpengaruh kepada kesiapan aparatur dalam menghasilkan kebijakan pembangunan secara tepat. Kesiapan aparatur daerah dalam mengantisipasi proses demokrasi tersebut, perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas prima dari kinerja pemerintahan.

8. Wilayah dan Tata Ruang

Tantangan kedepan dalam mewujudkan keseimbangan pertumbuhan antara wilayah adalah mengupayakan peningkatan penyediaan jaringan prasarana yang terintegrasi, perbaikan iklim usaha produksi dan pemasaran serta kelancaran investasi. Sehingga tercipta keterkaitan ekonomi antar sektor, antar wilayah dan antar kota/desa. Selain itu tantangan yang dihadapi dalam menyeimbangkan pertumbuhan antar wilayah adalah bagaimana mendorong perkembangan desa tertinggal dan terisolir dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang belum tergali dalam rangka menciptakan kawasan-kawasan potensi sosial ekonomi baru.

9. Perumahan dan Permukiman

Tantangan utama pembangunan perumahan dan permukiman dilatarbelakangi oleh adanya penambahan penduduk yang semakin meningkat yang tentunya membutuhkan tempat permukiman yang layak huni. Olehnya itu, pembangunan perumahan dan permukiman ke depan perlu diperhatikan bagaimana menciptakan tempat hunian yang sehat serta berwawasan lingkungan bagi masyarakat dalam berbagai strata kehidupan sosial ekonomi.

10. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Tantangan dalam bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah bagaimana menjaga dan melestarikan sumberdaya alam dan lingkungannya dengan daya dukung dan keseimbangan antar fungsi-fungsi kawasan. Olehnya itu, perlu dilakukan upaya-upaya pendekatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara multisektor, integratif dan komprehensif dengan tetap menjaga kelestariannya dalam rangka meningkatkan pengawasan serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang.

C. MODAL DASAR

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bone selama kurun waktu 2005-2025, didasari atas modal dasar sebagai berikut :

- a. Kabupaten Bone memiliki sumberdaya alam yang cukup memadai. Seperti sumberdaya lahan untuk pertanian/perkebunan, sumberdaya laut/pantai dan pertambangan (mineral) yang didukung dengan ketersediaan sumberdaya manusia serta infrastruktur sosial ekonomi.
- b. Kabupaten Bone memiliki posisi sangat strategis yang menghubungkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
- c. Kabupaten Bone memiliki jumlah penduduk relatif besar yang merupakan sumberdaya potensial dalam upaya peningkatan produktivitas pembangunan.
- d. Nilai-nilai budaya lokal dan keagamaan yang sangat kental, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumberdaya pembangunan seiring dengan suasana politik dan keamanan yang kondusif.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN BONE TAHUN 2005-2025

Visi dan misi Kabupaten Bone disusun berdasarkan kondisi dan tantangan yang dihadapi dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, dengan pengertian bahwa visi merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Misi, dinyatakan sebagai tugas yang diemban pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bone dalam mewujudkan keberadaan dan tanggung jawabnya terhadap pembangunan.

A. VISI

Visi Kabupaten Bone Tahun 2025, adalah : ***“Bone yang lebih sejahtera, demokratis, berkeadilan, damai dan agamis”***.

Dengan visi tersebut, diharapkan Kabupaten Bone dua puluh tahun mendatang, terwujud menjadi :

1. Sejahtera, diukur dengan : (a) meningkatnya kualitas hidup masyarakat; (b) berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran; (c) meningkatnya pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah; (d) meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah; (e) meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam; (f) peningkatan peran perempuan dan

- perlindungan anak; dan (g) meningkatnya pengelolaan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas.
2. Maju, yang diukur dengan : (a) meningkatnya investasi; (b) meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat; (c) meningkatnya pengelolaan perusahaan daerah; (d) meningkatnya pembangunan infrastruktur.
 3. Berdayasaing, diukur dengan : (a) meningkatnya produksi dan produktivitas berbasis keunggulan kompetitif; (b) terbangunnya keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan; (c) berkembangnya keprofesian serta penguasaan dan pemanfaatan teknologi.
 4. Demokratis, diukur dengan : (a) semakin mantapnya kelembagaan demokrasi; (b) meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah; (c) terjaminnya kebebasan pers dan media massa dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; (d) meningkatnya tatanan masyarakat sipil.
 5. Berkeadilan, diukur dengan : (a) tegaknya supremasi hukum; (b) penghapusan segala bentuk diskriminasi; (c) peningkatan pemahaman terhadap hak asasi manusia; dan (d) peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak.
 6. Damai diukur : (a) rendahnya tingkat kriminal, terror, intimidasi; (b) meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban; (c) meningkatnya

harmonisasi kehidupan bermasyarakat; dan (d) Pengembangan kebudayaan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat.

7. Agamis, diukur dengan : (a) semakin kuatnya jatidiri dan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) semakin terpeliharanya kerukunan internal dan antar umat beragama.

B. MISI

Agar visi Kabupaten Bone tahun 2005-2025 dapat diwujudkan, maka ditempuh misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas SDM yang tangguh dengan prioritas mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui : reorientasi kebijakan pendidikan dan pelatihan; demokratisasi pendidikan bagi seluruh warga masyarakat; meningkatkan kemampuan konseptual, teknis dan manajerial; meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat terutama penduduk miskin; mengembangkan cara penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan kesehatan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi; menanamkan pola hidup bersih dan sehat, pola makan gizi seimbang di lingkungan keluarga; meningkatkan upaya terpadu untuk makin menjamin kecukupan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.

2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, melalui : peningkatan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; meningkatkan efektivitas pengawasan aparat; peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, professional, produktif dan bertanggungjawab; peningkatan pemberdayaan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat; meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah secara efektif dan responsive; meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur; meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur; meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan dan menjamin tegaknya supremasi hukum, melalui : peningkatan kelembagaan demokrasi yang kokoh; memperkuat tatanan masyarakat sipil; meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah; mendukung pengembangan dan kebebasan media; meningkatkan penegakan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif; meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok/golongan dalam masyarakat; meningkatkan pemahaman terhadap hak azasi manusia.
4. Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, melalui : peningkatan pengamanan lahan sawah di daerah irigasi berproduktivitas tinggi; meningkatkan populasi hewan

ternak; meningkatkan diversifikasi pangan; meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perikanan; mengembangkan usaha pertanian terpadu dengan konsep agribisnis; meningkatkan daya saing produksi pertanian dan perikanan; penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha dalam mendukung pengembangan agro industri; peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan; peningkatan partisipasi masyarakat dengan pengembangan hutan tanaman; memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan; mengelola sumberdaya kelautan secara lestari; meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan merehabilitasi ekosistem yang rusak, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; peningkatan pengelolaan lingkungan hidup; membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan.

5. Mewujudkan stabilitas keuangan daerah, peningkatan investasi, dan penanggulangan kemiskinan, melalui : peningkatan penerimaan daerah dan efisiensi belanja daerah serta mengupayakan penurunan deficit anggaran secara bertahap; peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah; peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah; memacu aturan main yang jelas dalam prosedur perijinan dan pengelolaan usaha; menjamin kepastian usaha dan meningkatkan kepastian hukum terutama berkenaan dengan kepentingan untuk menghormati kontrak usaha dan menjaga

hak kepemilikan; merumuskan sistem insentif dalam rangka menarik investor; pengembangan sistem informasi penanaman modal; menyiapkan potensi sumberdaya , sarana dan prasarana yang terkait dengan investasi; penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui upaya pemenuhan hak atas pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, perumahan, air bersih, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi.

6. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kualitas beragama, pengembangan budaya, peranan perempuan dan perlindungan anak serta pemuda, dan olah raga, melalui : peningkatan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya; meningkatkan kualitas hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya daerah; meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial; meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial; meningkatkan kualitas pelayanan serta kualitas kehidupan beragama; mengembangkan modal sosial; reaktualisasi nilai-nilai kearifan sosial; meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk lokal; meningkatkan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan politik; meningkatkan kepedulian anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; memperkuat kelembagaan

koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak; meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama; meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; melindungi segenap generasi muda dan budaya penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan penyakit menular seksual; meningkatkan manajemen dan pengembangan olah raga; meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan kebugaran jasmani; meningkatkan sarana dan prasarana olah raga; meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olah raga.

7. Mewujudkan keamanan, ketertiban dan harmonisasi antar kelompok masyarakat, melalui : peningkatan peran serta masyarakat dan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan; meningkatkan tertib dan tegaknya hukum; terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; memberdayakan organisasi-organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan, dan lembaga sosial masyarakat dalam mencegah dan mengoreksi ketidakadilan, diskriminasi, dan ketimpangan sosial; memantapkan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan mediator dalam menjaga dan memelihara keamanan, perdamaian, dan harmoni dalam masyarakat; menerapkan kebijakan komunikasi

dan informasi sesuai dengan asas keterbukaan dan pemerataan akses informasi.

BAB IV

ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

A. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Arah pembangunan Kabupaten Bone tahun 2005-2025 memuat kebijakan rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek dalam mendukung terwujudnya visi Kabupaten Bone pada tahun 2025.

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan daerah dijabarkan sebagai berikut :

A. Mewujudkan kualitas SDM yang tangguh dengan prioritas mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

1. Reorientasi Kebijakan Pendidikan dan pelatihan agar tanggap terhadap dinamika pembangunan dan permintaan pasar tenaga kerja.

Perencanaan pendidikan diarahkan pada terwujudnya sistem pendidikan serta pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung upaya penurunan angka pengangguran melalui reorientasi tujuan pendidikan, yang mengarah pada pola pengembangan pendidikan berbasis pembangunan dan pemenuhan pasar tenaga kerja terampil

dan produktif. Antisipasi terhadap pengangguran remaja yang tamat sekolah menengah atas tidak lagi dilakukan setelah keluar dari sekolah tetapi selama proses pendidikan di SMU. Hal ini didasarkan pada kondisi faktual yang saat ini bahwa persentase tamatan SMU yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi cukup tinggi sehingga perlu upaya untuk peningkatan keterampilan melalui jalur formal yang terintegrasi dalam pola perencanaan pendidikan menengah umum, maupun jalur non-formal yang menyediakan pendidikan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja produktif

2. Demokratisasi pendidikan bagi seluruh warga masyarakat untuk mendapatkan haknya dalam pendidikan.

Hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan di aktualisasikan dengan upaya pemerintah dalam mengakomodasi dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dasar pendidikan melalui demokratisasi dan pemenuhan sarana dan prasarana serta kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Demokratisasi pendidikan didasari oleh keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pendidikan dan proses pembelajaran sehingga masyarakat tidak menyerahkan proses pendidikan kepada sekolah dan pemerintah saja. Hal ini bertujuan agar pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat sama-sama memikul tanggung jawab untuk merencanakan dan memajukan sistem pendidikan yang pada akhirnya mampu menjawab tantangan

pembangunan dan meningkatkan kapasitas dan mencerdaskan kehidupan masyarakat.

3. Peningkatan kemampuan konseptual, teknis dan manajerial

Terwujudnya sumber daya manusia yang kompetitif melalui proses pendidikan dan pelatihan, untuk menumbuhkan kemampuan teknis, ketrampilan hidup dan kemampuan manajerial yang unggul dalam berbagai bidang profesi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kemampuan angkatan kerja lokal untuk mengisi kebutuhan akan tenaga-tenaga profesional di Kabupaten Bone.

Terwujudnya masyarakat Bone yang berorientasi Iptek dan berkembang dinamis melalui upaya-upaya pendidikan dan pelatihan yang mengarah pada upaya pemanfaatan teknologi yang mendukung peningkatan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga lingkungan hidup dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan regional.

4. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Meningkatnya kualitas sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah ke arah terwujudnya sekolah bertaraf nasional dan internasional melalui upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan kualitas guru melalui pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi, peningkatan peran orang tua dalam

mendukung dan berpartisipasi dalam pendidikan anak di dalam dan diluar lingkungan sekolah.

Hal ini perlu didukung dengan upaya demokratisasi pendidikan dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya dibidang pendidikan. Juga demokrasi dalam kaitannya dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut peningkatan mutu pendidikan.

5. Peningkatan cakupan dan pelayanan mutu pelayanan kesehatan masyarakat terutama penduduk miskin

Meningkatnya pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau melalui upaya peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di bidang pelayanan kesehatan. Meningkatkan upaya peningkatan kesehatan secara mandiri dan swadaya masyarakat melalui fasilitasi pengembangan Desa Siaga diseluruh Kabupaten Bone yang bukan hanya terfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak tetapi pelayanan kesehatan pada umumnya guna mencapai visi Indonesia Sehat 2010

6. Penanaman kebiasaan pola hidup sehat, pola makan gizi seimbang, dan peningkatan kegiatan olahraga di lingkungan keluarga dan masyarakat

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bone melalui upaya perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan,

pelatihan dan penyadaran publik untuk mewujudkan masyarakat Bone yang sehat jasmani dan rohani serta didukung oleh pelayanan kesehatan yang lebih baik yang diarahkan pada usaha-usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan, menurunkan prevalensi wabah dan penyakit menular di kabupaten Bone. Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat melalui upaya terpenuhinya kebutuhan makanan bergizi yang berasal dari produksi lokal yang sehat dan berkualitas sehingga mampu membangun sinergitas antara produksi dan konsumsi yang mandiri dan sustainable.

7. Peningkatan upaya terpadu untuk menjamin kecukupan pangan dan perbaikan gizi masyarakat

Jaminan kecukupan pangan melalui usaha perbaikan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan pendapatan melalui sektor produksi dan upaya perbaikan gizi melalui pembiasaan pola konsumsi yang sehat dan berimbang.

8. Meningkatkan kegiatan olah raga di tengah masyarakat, sejak dini.

B. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

1. Meningkatnya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan

Terciptanya kondisi data yang sinkron diberbagai instansi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penjangaran

(networking) guna memberi pelayanan data yang cepat dan akurat kepada masyarakat dan dunia usaha sehingga mampu meningkatkan kredibilitas pemerintah sebagai sumber informasi yang cepat dan tepat.

Meningkatnya kecepatan arus data internal dan eksternal melalui layanan teknologi informasi dalam rangka efisiensi waktu, tenaga dan biaya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih professional.

2. Meningkatkan efektifitas pengawasan aparat melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat

Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui mekanisme pengawasan yang sehat dan professional secara prosedural dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dalam rangka mewujudkan peningkatan budaya kerja aparatur yang professional, bermoral, produktif dan bertanggung jawab.

3. Peningkatan pemberdayaan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Terwujudnya sinergitas yang positif antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, sehingga mampu saling mendukung dan upaya peningkatan pelayanan public yang prima dalam rangka meningkatkan produktifitas dan peningkatan kapasitas dunia usaha yang mampu mensejahterakan seluruh komponen masyarakat secara

adil dan berkesinambungan, melalui upaya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan dunia usaha dan masyarakat.

4. Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah secara efektif dan responsif
5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan

Meningkatnya profesionalisme aparat melalui pendidikan dan pelatihan serta perekrutan aparat yang tepat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sehingga mampu mendukung percepatan penciptaan pelayanan publik yang prima.

Adanya mekanisme pelayanan publik yang professional dan responsive, cepat dan murah sehingga menumbuhkan iklim pelayanan yang sehat dan bebas manipulasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Meningkatnya budaya kerja aparatur yang bermoral, responsive dan bertanggung jawab melalui upaya pengawasan internal dan eksternal yang disiplin dan sinergis.

- C. Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan dan menjamin tegaknya supremasi hukum

Meningkatkan Kelembagaan demokrasi yang kokoh dengan mempertegas tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan mekanisme checks and balances

Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang disiplin melalui manajemen konflik yang berlandaskan hukum yang mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Terciptanya struktur masyarakat yang taat hukum dan peraturan sehingga mampu mendukung pelaksanaan demokratisasi pemerintahan dan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Memperkuat tatanan masyarakat sipil

Terciptanya tatanan masyarakat yang menghargai perbedaan dalam kerangka budaya dan agama yang kuat, toleran dan saling mendukung, sehingga mampu mendukung terciptanya keamanan, ketertiban dan ketentraman di masyarakat sehingga dapat memperlancar proses pembangunan.

Terciptanya masyarakat yang mampu berpartisipasi aktif secara positif dan produktif dalam proses pengambilan keputusan dan proses demokratisasi pelaksanaan pemerintahan.

Terciptanya kerjasama yang harmonis antara kelompok dan golongan dalam masyarakat, agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing, melalui peningkatan pemahaman yang baik terhadap hak-hak asasi manusia di segala lini kehidupan.

2. Peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah

Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih baik melalui proses demokratisasi pengambilan keputusan dan peningkatan kemandirian daerah dibidang ekonomi yang didukung pula dengan peningkatan kelembagaan demokrasi yang kokoh dengan mempertegas tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan mekanisme checks and balances yang lebih optimal.

Terciptanya tatanan masyarakat sipil yang demokratis, cerdas dan mampu berpartisipasi secara produktif dalam pembangunan, melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan negara.

3. Mewujudkan demokrasi melalui pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat

Terwujudnya kestabilan sosial politik yang sehat dan dinamis serta semakin membaiknya demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan melalui proses pendidikan politik dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan adat budaya yang ada serta perubahan nasional dan global sehingga pemerintah daerah dan masyarakat serta dunia usaha yang ada di Kabupaten Bone tidak tertinggal dan mampu

ikut serta dalam dinamika perubahan global secara cerdas serta tetap berada dalam nilai-nilai dan kearifan lokal.

4. Mewujudkan tegaknya supremasi hukum disegala bidang untuk menciptakan rasa aman dan tentram bagi seluruh masyarakat

Terciptanya masyarakat yang taat hukum dan berkeadilan dalam segala bidang sehingga mampu mendukung terwujudnya keadilan dan rasa aman serta menghapus segala bentuk intimidasi dan ketidakadilan.

Terwujudnya perlindungan hukum bagi kelompok-kelompok masyarakat marginal dan rentan baik terhadap eksploitasi sumber daya manusia maupun perlindungan hukum bagi hak milik dan property yang mereka miliki.

Terwujudnya kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya alam guna menghindari terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan serta over-eksploitasi sumber daya alam yang menimbulkan kerusakan lingkungan maupun yang tidak memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Mendukung kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat sebagai wujud demokratisasi proses pengawasan oleh masyarakat dan lembaga non pemerintah.

D. Mewujudkan peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

1. Peningkatan pengamanan lahan sawah didaerah irigasi berproduktifitas tinggi menuju kemandirian pangan

Upaya pengendalian konversi lahan sawah ke pemanfaatan non-pertanian diarahkan pada pengendalian daerah atau lahan produktif beririgasi, sehingga mampu mempertahankan fungsi lahan sawah dalam upaya untuk memenuhi ketahanan pangan dan surplus beras daerah Kabupaten Bone.

Adanya kompetisi kepentingan pembangunan dan kebutuhan akan lahan usaha serta lahan pemukiman perlu diantisipasi secara bijak dan melalui kajian-kajian yang mendalam terhadap dampak ekonomi, dampak sosial dan dampak lingkungannya sehingga kepentingan pangan dan kepentingan pembangunan dapat dicarikan solusi bijak dan saling menguntungkan.

2. Peningkatan populasi hewan ternak

Terwujudnya pemenuhan akan bahan pangan lokal dan kebutuhan pasar regional dengan produk ternak berkualitas melalui upaya peningkatan produksi ternak sehat dan berkualitas,

bebas hama dan penyakit. Hal ini dapat diwujudkan dengan menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dan berbasis perdesaan dalam rangka penyediaan lahan (padang rumput) yang berkualitas dan berkesinambungan, serta tenaga kerja produktif dan trampil dibidang peternakan.

3. Peningkatan diversifikasi pangan

Terwujudnya pemenuhan pangan melalui tersediannya bahan pangan beras dan non-beras sebagai alternatif sumber energi karbohidrat. Hal ini juga akan mendukung diversifikasi pertanian melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian bukan sawah, sehingga seluruh lahan memiliki produktifitas tinggi dan bernilai ekonomi tinggi.

4. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan

Terwujudnya pemanfaatan teknologi kelautan yang mampu mendukung peningkatan kapasitas produksi kelautan dan perikanan dengan adanya fasilitas pembenihan dan pengembangan yang mengadopsi teknologi modern guna memenuhi kebutuhan dan memperlancar mekanisme pasar yang telah tercipta.

5. Pengembangan usaha pertanian secara terpadu dengan konsep agribisnis

Meningkatnya diversifikasi pangan, produksi hewan ternak serta peningkatan produktifitas lahan beririgasi, peningkatan produksi perikanan dan kelautan, hasil hutan baik kayu maupun non-kayu secara terpadu untuk meningkatkan produksi serta mendukung pengembangan agribisnis yang berkelanjutan.

6. Peningkatan daya saing produksi pertanian dan perikanan melalui upaya peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan serta sistem standar mutu

Terciptanya peningkatan kualitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan melalui memanfaatkan teknologi pasca panen yang modern, sehingga mampu menembus pangsa pasar yang lebih luas dengan harga dan daya saing yang tinggi.

7. Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk kelola resiko usaha pertanian dalam mendukung pengembangan agroindustri

Terciptanya kondisi usaha agroindustri yang produktif dan berkesinambungan melalui manajemen usaha yang baik dan profesional di bidang produksi, penanganan pasca panen, distribusi dan pemasaran hasil produksi, oleh masyarakat lokal sebagai pelaku aktif kegiatan agroindustri.

8. Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan tanaman industri
9. Perkuatan kelembagaan pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produksi, dan meningkatkan skal perusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan

Terciptanya partisipasi masyarakat yang berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi produktif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang berbasis entrepreneur dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya

10. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diwilayah pesisir, laut dan air tawar

Terbinanya hubungan hulu-hilir yang memungkinkan terkendalinya potensi banjir akibat perubahan fungsi hutan dan lahan serta upaya mitigasi bencana yang terpadu sesuai dengan alur topografi wilayah. Hal ini ditandai dengan terwujudnya kerjasama dengan kabupaten lain yang sejalur sehingga tercipta pembagian wewenang dan tanggung jawab yang adil bagi usaha-usaha untuk menciptakan keserasian hubungan hulu-hilir.

Terbinanya lingkungan pesisir, terjaga dari dampak banjir dan erosi serta dampak dari abrasi pantai, melalui usaha

rehabilitasi dan penyadaran publik sehingga mampu memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

11. Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan

Terwujudnya kabupaten Bone yang asri ditandai dengan terbinanya lingkungan hidup dikawasan perkotaan dan pedesaan, penanganan sampah yang memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan dan usaha daur ulang, terciptanya jalur hijau yang mampu menyerap emisi gas karbon secara maksimal.

Terwujudnya Kabupaten Bone yang berwawasan lingkungan dengan terjaganya integritas ekosistem yang sesuai dengan jalur migrasi satwa liar endemik sehingga tercipta keberlangsungan kehidupan dan saling ketergantungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan.

Terwujudnya Kabupaten Bone yang berkelanjutan (sustainable), yang ditandai dengan terjaganya pemanfaatan sumber daya alam yang terbaharukan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab serta berdasarkan analisa kebutuhan yang akurat agar mampu memberi manfaat yang besar sehingga mampu menciptakan Kabupaten Bone yang mampu memenuhi

kebutuhan pangan dan sandang bagi kesejahteraan hidup masyarakat dari generasi ke generasi.

12. Peningkatan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup

Terwujudnya kesadaran seluruh komponen masyarakat bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah urusan dan kepentingan bersama, sehingga tercipta sinergitas pemanfaatan sumber daya alam dengan upaya-upaya konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat terwujud melalui pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara adil dan bertanggung jawab.

13. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup

Terwujudnya kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan melalui upaya pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat, sehingga mampu berperilaku sadar lingkungan dan ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.

14. Pemanfaatan Keunggulan Kompetitif dalam rangka menciptakan struktur ekonomi produktif dan berbasis masyarakat.

Upaya untuk membawa masyarakat Bone kearah kehidupan yang lebih sejahtera diarahkan pada orientasi pembangunan ekonomi yang berskala lebih besar. Dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif (*competitive and comparative advantage*) Kabupaten Bone dalam hal produksi, sarana dan prasana pendukung kegiatan ekonomi produktif dan mobilitas pasar regional. Sehingga Kabupaten Bone mampu untuk berpartisipasi secara produktif dalam pasar regional dan global melalui usaha yang lebih maksimal.

. Terciptanya iklim usaha yang kondusif dengan dukungan kelembagaan dan proses perizinan yang cepat, murah dan mudah, serta stabilitas sosial politik yang memberi rasa aman kepada seluruh pelaku ekonomi, sehingga terwujud sinergitas Pemerintah melalui good public governance – Dunia Usaha (Good Corporate Governance) - dan masyarakat (civil society) sebagai tiga pilar penyangga yang mampu menciptakan kondisi perekonomian yang adil dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

Terciptanya pembangunan sektor pariwisata dan jasa yang mendukung peningkatan nilai tambah hasil – hasil potensi daerah, peningkatan jaringan pemasaran dengan daerah pusat-pusat pariwisata Indonesia maupun pasar internasional.

Dalam rangka menciptakan Kabupaten Bone sebagai pusat perdagangan regional yang sehat dan kompetitif tersedia teknologi pendukung yang mampu menciptakan komunikasi yang cepat, tepat waktu dan tepat sasaran, serta dukungan sumber daya manusia yang handal dan trampil yang mampu memenangkan pasar seluas-luasnya bagi produk-produk andalan Kabupaten Bone.

E. Mengembangkan kemampuan untuk memperluas target pasar regional, nasional dan internasional secara proporsional dan berkelanjutan

1. Kota Watampone Sebagai Pusat Perdagangan Regional

Terwujudnya Kota Watampone sebagai Kota perdagangan dan jasa yang mampu melayani kebutuhan lokal dan regional, dengan dukungan sarana dan prasarana yang modern dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Jasa, infrastruktur dan jasa keuangan dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar mampu mendukung secara efektif peningkatan produksi dan daya saing regional dengan menerapkan sistem dan standar pengelolaan yang sesuai dengan praktik terbaik (*the best practice*) di Kabupaten Bone, yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta nilai tambah perekonomian daerah dan yang mampu mendukung kepentingan

strategis di dalam pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pengembangan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan.

Adanya iklim usaha yang kondusif dengan dukungan kelembagaan dan perizinan, kepastian hukum serta profesionalisme aparat yang mampu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sasaran sehingga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperbesar peluang masuknya investasi ke Kabupaten Bone.

Pemanfaatan momentum-momentum penting untuk mencari peluang pasar melalui pameran-pameran dan event – event penting yang mampu menarik investasi ke Kabupaten Bone untuk meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi serta peningkatan infrastruktur penunjang.

2. Integrasi Pengembangan Kota – Desa

Pengembangan kota dan desa harus saling mendukung dimana desa sebagai daerah produksi dan kota sebagai penyedia jasa pemasaran yang saling ketergantungan melalui pengembangan sentra-sentra produksi dan pemasaran melalui klusterisasi dan pengembangan infrastruktur penunjang yang mampu mempercepat pengembangan wilayah pedesaan dan pemerataan pembangunan.

Peningkatan kapasitas terutama untuk menanggulangi tingkat pengangguran remaja putus sekolah di daerah pedesaan diupayakan melalui pola pendidikan dan pelatihan ketrampilan hidup sehingga mereka mampu memanfaatkan sumber daya alam di pedesaan secara produktif dan berkelanjutan.

3. Pengentasan Kemiskinan Secara Terpadu

Upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan diarahkan pada usaha untuk mengurangi ketergantungan pada program-program bantuan tunai yang tidak sustainable dengan mengintegrasikan upaya untuk membangun ekonomi produktif dan peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui upaya pendidikan dan pelatihan manajemen keuangan dan usaha kecil sehingga tercipta masyarakat yang lebih mandiri dan produktif.

4. Pemanfaatan Teknologi Jasa (e-services)

Sektor jasa adalah bisnis masa depan yang sangat menjanjikan, teknologi informasi dan berkembangnya dunia virtual memberi ruang yang cukup luas bagi usaha memajukan sektor jasa di Kabupaten Bone. 27 kecamatan dengan struktur masyarakat yang dinamis membutuhkan dinamika yang cepat dalam hal pelayanan jasa. Implementasi dunia e-services dalam jasa perbankan dan keuangan, telekomunikasi, transportasi, teknologi pendidikan, yang semakin memudahkan dan memperpendek jalur pelayanan jasa.

F. Mewujudkan ketahanan sosial budaya melalui peningkatan kesejahteraan sosial, kualitas beragama, pengembangan budaya dan pariwisata, peran perempuan, pemuda dan olah raga

1. Terwujudnya Bone Sebagai Pusat Studi Budaya Bugis

Terwujudnya Kabupaten Bone sebagai pusat studi budaya bugis yang luhur dan maju serta di kenal oleh dunia luar melalui kegiatan penelitian, studi dan promosi pariwisata, melalui penyediaan sarana dan prasarana, kompilasi data dan buku-buku referensi, sehingga mampu memberi sumbangsih bagi ketahanan akar budaya bangsa dan mewariskannya kepada generasi penerus bangsa. Sehingga mampu mendukung terwujudnya karakter bangsa yang tangguh melalui pemahaman budaya yang baik dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika.

2. Peningkatan Peran Perempuan dan pengarusutamaan gender

Peran perempuan dalam pembangunan dimulai dengan pemahaman yang baik tentang keadilan dan kesetaraan jender yang berakar pada budaya serta harkat dan martabat bangsa sehingga peran perempuan sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dalam segala sektor pembangunan tidak menimbulkan konflik dan mampu menjadikan lingkungan dan kondisi kerja lebih produktif dan berkualitas.

Terciptanya kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender, perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak yang berkelanjutan bagi upaya menciptakan masyarakat sipil yang mendukung upaya terpadu bagi penciptaan generasi yang unggul dan berprestasi.

Meningkatnya kapasitas perempuan melalui perbaikan tingkat kesehatan dan kesejahteraan ibu sehingga mampu menciptakan dan membimbing generasi yang berkualitas dimasa yang akan datang.

3. Pembinaan pemuda dan olah raga

Meningkatnya minat dan prestasi generasi muda melalui pembinaan olah raga prestasi melalui peningkatan sarana dan prasarana, meningkatnya semangat kompetisi sehingga mampu melahirkan prestasi yang tinggi baik ditingkat nasional maupun internasional.

Meningkatnya kapasitas generasi muda melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk menciptakan generasi yang mandiri, kreatif dan memiliki ketrampilan hidup guna mengurangi angka pengangguran generasi muda.

Tersedianya sarana dan prasaran serta akses yang lebih luas bagi generasi muda dalam mendukung upaya peningkatan prestasi olah raga dan peningkatan derajat kesehatan.

Meningkatnya kapasitas generasi muda dibidang keagamaan dan ketahanan mental sehingga mampu menghadapi dampak negatif arus globalisasi sehingga mampu tampil sebagai generasi yang unggul, positif dan produktif.

Terciptanya jaringan dan kelembagaan yang baik bagi upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, minuman keras dan penyakit menular seksual dikalangan generasi muda melalui koordinasi yang lebih baik dan terpadu antara pihak pemerintah, kepolisian, media dan lembaga non-pemerintah.

4. Terwujudnya kerukunan beragama melalui peningkatan pemahaman nilai-nilai dan ajaran agama

Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan guna mendukung peningkatan pendidikan dan pembelajaran agama guna mewujudkan peningkatan pemahaman internal ajaran agama masing-masing serta pemahaman akan keberagaman dan toleransi antar umat beragama.

Pemberdayaan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan dalam rangka peningkatan peran umat beragama dalam menciptakan tatanan masyarakat sipil yang lebih sehat dan demokratis.

Terwujudnya sumber daya manusia yang berbudaya dan berakhlak mulia yang di cirikan dengan watak dan perilaku

manusia dan toleran, peduli sesama dan menjunjung tinggi adat budaya lokal dan martabat bangsa.

Terwujudnya masyarakat Bone yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran dan berjiwa gotong royong serta mampu menjalin hubungan yang harmonis antar sesama manusia, sesama pemeluk agama dan mengelola lingkungan hidup dengan landasan agama.

G. Mewujudkan keamanan, ketertiban dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan

Terwujudnya masyarakat dan aparat yang taat hukum dan memiliki kapasitas yang baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban, melalui upaya peningkatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan sehingga mampu mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Terwujudnya peningkatan mekanisme pelayanan dan perlindungan masyarakat melalui peningkatan kemampuan aparat, peningkatan sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi dalam membangun koordinasi pelaksanaan tugas dalam

menjaga dan melindungi masyarakat dari tindak kejahatan dan gangguan – gangguan keamanan.

3. pemberdayaan organisasi-organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengoreksi keadilan, diskriminasi dan ketimpangan sosial.

Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya daerah, melalui peningkatan pemberdayaan kelompok dan organisasi kemasyarakatan.

Terbukanya ruang bagi terciptanya keragaman budaya dan kearifan sosial dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui upaya reaktualisasi dan dialog budaya sebagai media pembelajaran bagi pemahaman nilai-nilai toleransi dan persatuan bangsa.

4. memantapkan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan mediator dalam menjaga dan memelihara keamanan, perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.

Terwujudnya peningkatan peran pemerintah secara produktif dan berkesinambungan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, penyediaan sarana dan prasarana serta koordinasi yang lebih baik dalam mewujudkan kamanan dan perdamaian di masyarakat.

B. TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Untuk mencapai visi melalui upaya-upaya ideal dengan memperhatikan karakteristik dan potensi-potensi daerah Kabupaten Bone, maka pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Sasaran-sasaran pokok dalam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

1. RPJM ke-1 (2005 – 2009)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM I diarahkan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi upaya untuk mengakselerasi pembangunan Kabupaten Bone dimasa yang akan datang.

Pelaksanaan otonomi daerah harus terus dievaluasi melalui pewacanaan dengan berbagai unsur yang ada di Kabupaten Bone, dengan tujuan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bone serta untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan

aturan yang harus ada atau harus dihilangkan guna memperkuat peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Pengembangan ekonomi diarahkan pada peningkatan potensi daerah dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kelautan melalui peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas, peremajaan tanaman budidaya dan upaya pemberian bantuan dan pinjaman modal. Sehingga Kabupaten Bone mampu memenuhi permintaan pasar lokal, regional maupun nasional dan internasional akan bahan pangan secara berkelanjutan.

Dibidang pertanian telah dirintis kerjasama dan koordinasi antar instansi dalam upaya pengembangan pertanian melalui upaya untuk demokratisasi pengembangan pertanian dengan memberi ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan (*mainstreaming*) masyarakat petani seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan keuangan dan kelembagaan di bidang pertanian. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Daerah tentang Irigasi yang meletakkan

dasar-dasar bagi upaya partisipasi aktif masyarakat petani dalam pengambilan keputusan.

Mendukung kebijakan Pemerintah untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun pada tahun 2008/2009, perintisan peningkatan kualitas pendidikan formal dan non-formal melalui program pendidikan enam tahun di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ sederajat, dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/sederajat, serta jalur non formal (luar sekolah) dilaksanakan melalui Program Belajar Paket A setara SD, program Belajar Paket B setara SMP, serta Pondok Pesantren melalui pemenuhan kebutuhan akan tenaga-tenaga pengajar yang memenuhi standar sertifikasi nasional. Peningkatan sarana dan prasarana serta teknologi pendidikan yang mendukung percepatan penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui upaya pemerintah daerah serta kerja sama dengan pihak-pihak lain yang kompeten yang mampu membantu dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bone.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain, ditandai oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) yang diarahkan

untuk membangun SDM yang berkarakter cerdas, adil dan beradab, berkepribadian, tangguh, kompetitif, bermoral, dan berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong-royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek; meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka pencapaian Visi Indonesia Sehat 2010; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; dan mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup. Kondisi itu dicapai dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yg lebih kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur.

Percepatan pembangunan infrastruktur lebih didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan, terutama untuk sektor transportasi, energi dan

kelistrikan, serta pos dan telematika. Bersamaan dengan itu dilaksanakan revitalisasi kelembagaan pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki lokasi strategis, antara lain klasterisasi dan pengembangan sentra produksi unggulan.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dan menyadari pentingnya menjaga lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hal itu didukung oleh pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas di setiap tingkatan pemerintahan dalam rangka penanggulangan bencana serta diacunya rencana tata ruang secara hierarki dari tingkatan daerah, pulau, provinsi, hingga kabupaten/kota sebagai payung kebijakan spasial semua sektor dalam rangka mencegah dampak kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan dampak bencana.

2. RPJM ke-2 (2010 – 2014)

Capaian-capaian dari periode sebelumnya menjadi landasan dan refleksi dalam melanjutkan pembangunan, untuk lebih mempertajam tujuan pembangunan secara menyeluruh.

Pelaksanaan otonomi daerah semakin mantap baik dibidang pemerintahan maupun pelayanan publik melalui proses peningkatan pemahaman dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Kondisi itu mendorong tercapainya peningkatan kemampuan dan kontribusi daerah dalam menciptakan kemandirian lokal dibidang ekonomi, pemerintahan yang bersih dan profesional dalam mewujudkan tatanan Indonesia yang lebih maju, adil dan berkembang kearah yang lebih baik.

Kabupaten Bone mampu menjadi daerah yang unggul dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui usaha-usaha pengembangan perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, jaringan pasar lokal, regional dan internasional yang kuat dan stabil, adil dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan bagi pembinaan lingkungan hidup

Upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millenium 2015 masih terus diupayakan dengan mengacu pada pencapaian periode sebelumnya dan periode berjalan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

memerangi disparitas gender, manajemen pelayananan yang efisien dan efektif dalam bidang pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, menekan angka kematian ibu dan balita, meningkatkan perekonomian yang berbasis keunggulan lokal dan pembinaan lingkungan hidup.

Keamanan dan stabilitas daerah semakin baik serta mampu memberi rasa aman bagi seluruh masyarakat, pelaku ekonomi lokal, regional maupun para investor. Pintu – pitnu masuk ke Kabupaten Bone melalui darat dan laut merupakan zona yang aman dari tindak kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

3. RPJM ke-3 (2015 - 2019)

Tahun 2015 sebagai akhir dari target pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) maka periode ini ditandai dengan akselerasi usaha-usaha untuk mengejar ketertinggalan atau memenuhi target yang belum tercapai di segala bidang pembangunan.

Kabupaten Bone sebagai salah satu kabupaten yang berpartisipasi dalam kerja sama dengan UNICEF untuk melakukan monitoring MDGs maka diharapkan tahun 2015 sebagai batas akhir pencapaian target MDGs dapat dipenuhi

dengan tercapainya seluruh target dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan (*eradicate extreme hunger and poverty*), mewujudkan pendidikan dasar untuk semua (*achieve universal primary education*), terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (*promote gender equality and empower women*), penurunan angka kematian bayi (*reduce child mortality*), meningkatnya kesehatan ibu (*improve maternal health*), pengendalian penyebaran malaria, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya (*combat malaria, HIV/AIDS and other diseases*) serta terciptanya sustainability lingkungan hidup (*ensure environmental sustainability*).

Persoalan kemiskinan dapat diatasi dengan terciptanya iklim usaha produktif berbasis kerakyatan yang mampu memperluas lapangan kerja, perkuatan sektor pertanian sehingga menjamin ketahanan pangan lokal, penyediaan lapangan kerja yang berkelanjutan

Tidak ada lagi masalah disparitas gender karena adanya pemenuhan target partisipasi laki-laki dan perempuan di segala bidang pembangunan. Sehingga tercipta keadilan gender yang sesuai dengan kapasitas dan budaya bangsa.

Partisipasi sekolah terpenuhi untuk semua anak usia sekolah sehingga tidak ada lagi generasi buta huruf di Kabupaten Bone. Hal ini dapat dicapai adanya data dan

pemetaan yang akurat mengenai penyebaran anak usia sekolah serta partisipasi sekolah di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bone sehingga ada tolak ukur yang jelas untuk penanganan pemerataan pendidikan dan pemberantasan buta huruf.

Terpenuhinya sarana dan prasarana dasar bagi seluruh penduduk Bone seperti akses terhadap air bersih yang mudah dan murah, akses sarana dan prasarana kesehatan yang murah dan cepat. Rasio tenaga kesehatan berbanding penduduk memenuhi standar pelayanan sehingga mampu memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat terutama dipedesaan. Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan daerah yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Luas lahan kritis berkurang melalui upaya rehabilitasi lahan dan hutan, revitalisasi lahan kritis dengan mendukung dan membiayai studi dan penelitian ilmiah untuk mengetahui jenis tanaman budidaya yang sesuai dengan kondisi lahan.

Sejalan dengan itu, kehidupan masyarakat yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui proses – proses yang damai dan demokratis.

Periode ini juga di tandai dengan terciptanya iklim pelayanan publik yang berkualitas, lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel serta terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.

Daya saing perekonomian meningkat melalui peningkatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi kerakyatan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Penataan ruang kabupaten bersinergi dengan penataan ruang propinsi, pulau dan juga penataan ruang nasional sehingga mampu mendukung upaya untuk memanfaatkan ruang sesuai harmonisasi ekologis-ekonomisnya sehingga pemanfaatan ruang memberi manfaat yang sebesar-besar serta tidak menimbulkan persoalan baru serta bencana bagi manusia. Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, teknologi informasi, energi ramah lingkungan untuk kelistrikan, serta pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, ramah lingkungan, optimal, dan berkelanjutan.

4. RPJM ke-4 (2020 – 2024)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Bone yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian lokal yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif regional, nasional dan internasional.

Perekonomian berkembang dengan baik dengan sistem ekonomi kerakyatan yang kuat dan mandiri. Hal ini ditunjang oleh jaringan pasar yang kuat dan stabil, serta partisipasi masyarakat Bone yang tinggi dalam dunia usaha, produksi dan jasa. Sistem perekonomian yang berjalan mampu menciptakan persaingan yang sehat dan produktif, serta mampu berjalan dengan adil dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu tonggak utama bagi terwujudnya Kabupaten Bone yang maju dan mandiri. Kualitas pendidikan yang tersedia mampu mengakomodasi kebutuhan dunia usaha, jasa dan produksi dan angkatan kerja baik laki-laki maupun perempuan dapat terserap secara maksimal dalam seluruh lapangan kerja yang tersedia. Hal ini adalah hasil dari usaha-usaha peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan pada periode-periode sebelumnya dan juga mengikuti trend global dunia usaha dan persaingan angkatan kerja yang kiat ketat dan menuntut kualifikasi yang kian tinggi dan ketrampilan yang lebih profesional.

Pemanfaatan sumber daya alam yang terbaharukan dan eksploitasi sumber daya yang tidak terbaharukan mampu menjadi penyangga utama perekonomian Kabupaten Bone diluar pajak dan retribusi lainnya, sehingga terwujud kemandirian

ekonomi di Kabupaten Bone. Konsep pemanfaatan yang berkelanjutan tersebut didasari oleh adanya analisis multikriteria kebutuhan dan kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya yang ada, sehingga tercipta keseimbangan pemanfaatan dan kesinambungan dalam hal ketersediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang.

Daerah pesisir dimanfaatkan secara optimal untuk produksi perikanan dan kelautan serta pariwisata yang produktif, berkelanjutan dan berbasis kerakyatan dan budaya lokal.

Demikian juga dengan pengelolaan wilayah daratan yang mengacu pada pengelolaan tata ruang dan konsep optimalisasi pemanfaatan lahan. Penetapan lahan sawah abadi untuk mencegah terjadinya konversi lahan sawah kearah pemanfaatan non pertanian sehingga mampu menjamin keberlanjutan ketersediaan pangan baik bagi konsumsi lokal maupun regional.

Antisipasi terhadap pengembangan wilayah pemukiman tidak lagi memanfaatkan lahan sawah tetapi terintegrasi dengan tata ruang wilayah kabupaten, integritas ekologi, topografi dan infrastruktur, sehingga tercipta keteraturan wilayah pemukiman dan kemudahan bagi instalasi komponen infrastruktur dan kemudahan akses dan keindahan dan kerapian wilayah pemukiman.

Terciptanya masyarakat Kabupaten Bone yang sadar teknologi sehingga mampu membangun hubungan yang baik dan berpartisipasi aktif dalam percaturan ekonomi regional dan global yang bergerak kian cepat. Hal ini didukung dengan tersedianya infrastruktur dan pelayanan jasa teknologi informasi, teknologi yang mendukung pelayanan yang cepat dan profesional dibidang produksi dan distribusi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain yang pada gilirannya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bone sendiri.

Terciptanya Kabupaten Bone yang maju dan modern dalam koridor ketahanan budaya lokal yang kuat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga mampu menciptakan manusia Indonesia yang bangga menjadi bangsa Indonesia.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

RPJP Daerah menjadi pedoman bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RPJM Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi Kabupaten Bone yang lebih sejahtera, demokratis, berkeadilan, damai dan agamis perlu didukung oleh komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis, konsistensi kebijakan Perda, keberpihakan kepada rakyat dan peran serta masyarakat dalam dunia usaha secara aktif.

BUPATI BONE

H. A. MUH. IDRIS GALIGO, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengantar	1
B. Pengertian	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Landasan Hukum	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II KONDISI UMUM	6
A. Kondisi Saat Ini	6
B. Tantangan	18
C. Modal Dasar	24
BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN BONE TAHUN 2005-2025	26
A. Visi	26
B. Misi	28
BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025	34
A. Arah Pembangunan Jangka Panjang.....	34
B. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang.	58
BAB V PENUTUP	73